1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut: Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari. Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.

Jawaban

Sebagai seorang staf pada bidang Kesejahteraan dan LPASN untuk saat ini sudah cukup baik khususnya proses pengajuan pensiun, memang ada beberapa masih prosesnya lama dan menggunakan metode yang lama, jika ada pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama kami terus berusaha untuk menemukan ide-ide baru yang nantinya akan mempercepat proses dari pekerjaan, dan tetap berkonsultasi kepada atasan dengan ide tersebut dan tetap berpedoman pada Permendagri 52 tahun 2009.

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan.

Kendala yang dihadapi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang serta luntarnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Solusinya yaitu dengan adanya sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin PNS tersebut diatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin..

Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dijatuhi hukuman disiplin yang terbagi dalam tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

1. Hukuman Ringan meliputi:
 - a) Teguran Lisan;
 - b) Teguran Tertulis; dan
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman Sedang meliputi:
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun;
 - b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun; dan
 - c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.
3. Hukuman Berat meliputi:
 - a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun;
 - b) Pembebasan dari jabatan;
 - c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan d) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Jika saya sedang menjabat eselon IV merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini staf saya mengenai kedisiplinan. misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin. Akan tetapi setelah melakukan upaya-upaya pendekatan PNS tersebut masih juga melakukan pelanggaran , misalnya tidak masuk kerja 11 hari tanpa keterangan, saya akan akan menjalankan aturan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 yaitu memberikan teguran “Pernyataan tidak puas secara tertulis” yang nanti bisa memberi efek jera bagi PNS itu sendiri dan juga tidak melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi.